KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Novanto tidak akan layangkan keberatan
Tanggal : Rabu, 19 April 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Novanto tidak akan Layangkan Keberatan

KETUA DPR, Setya Novanto, mengatakan tidak akan melayangkan nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas pencekalan dirinya ke luar negeri. Ia memastikan akan kooperatif mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

"Enggak. Enggak kita enggak menyampaikan (nota keberatan ke presiden). Kita sangat kooperatif. Kita menghargai KPK," kata Novanto seusai menghadiri peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Ia pun menjelaskan, awalnya semua fraksi dan pimpinan di DPR memang berencana mengirimkan nota keberatan atas pencekalan terhadap dirinya kepada Jokowi. Namun, ia telah menyampaikan kepada mereka bahwa itu tidak perlu dilakukan. "Setelah saya sampaikan, mereka juga bisa mengerti," tambahnya.

Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan nota keberatan tidak bisa serta-merta dibatalkan. Fahri menjelaskan keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) harus dibatalkan melalui forum Bamus kembali.

> DPR meminta konsultasi dengan presiden untuk membahas pencekalan Setya Novanto.

"Rapat Bamus kalau mau dibatalkan pakai rapat Bamus, enggak bisa karena inisiatif orang-orang. Kita enggak boleh melanggar aturan dalam organisasi," ujarnya.

DPR, lanjut Fahri, juga tengah mengatur rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas nota keberatan terkait dengan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri. "Kita sedang mengatur rapat konsultasi dengan presiden dan dalam rapat konsultasi itu akan disampaikan dan dijelaskan supaya tidak ada pertanyaan setelah itu," katanya.

Rapat konsultasi tersebut, kata Fahri, direncanakan berlangsung setelah gelaran pilkada DKI putaran kedua. Rencana rapat konsultasi tersebut akan dibahas terlebih dahulu bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Nanti malam kita matangkan dengan Sesneg," akunya.

KPK mencekal Novanto terkait dengan kasus dugaan korupsi KTP-E sejak 9 April lalu. Pencekalan itu berlaku selama enam bulan. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pencekalan itu dilakukan lantaran keterangannya dibutuhkan dalam proses penyidikan soal tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. (Nur/Nov/P-4)

PERPUSTAKAAN DPR-RI